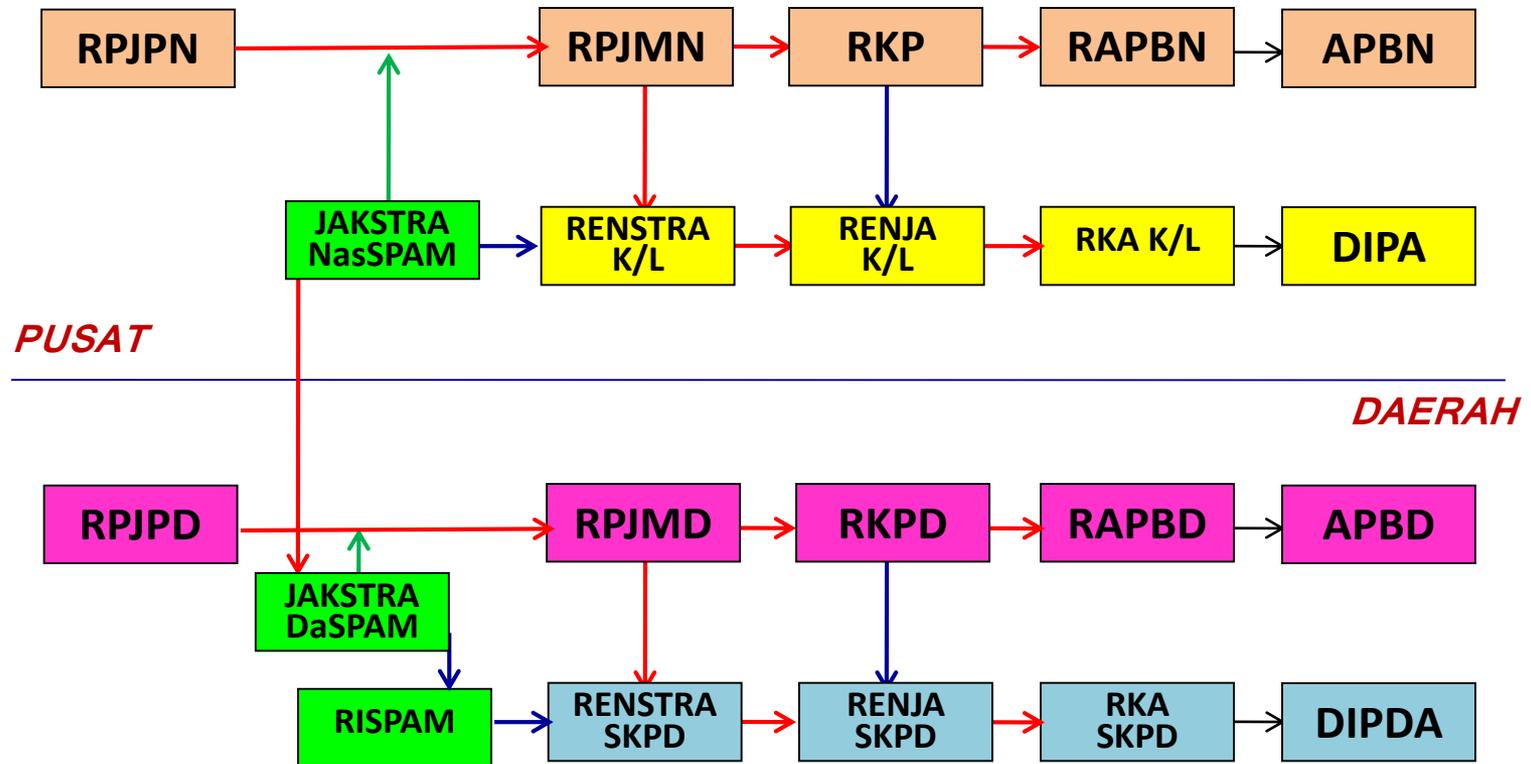


**PEDOMAN PENYUSUNAN
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENGEMBANGAN SPAM**



Penjelasan warna garis

→ Pedoman

→ Diacu

→ Masukan

SISTEMATIKA (OUTLINE) JAKSTRADA

DAFTAR ISI

BAB I - PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Pengertian
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Landasan Hukum
 - 1.4.1 Arah Kebijakan
 - 1.4.2 Peraturan Teknis

BAB II - VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

- 2.1 Visi
- 2.2 Misi
- 2.3 Tujuan
- 2.4 Sasaran

SISTEMATIKA (OUTLINE) JAKSTRADA

BAB III - ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN, DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

3.1 Isu Strategis dan Permasalahan Pengembangan SPAM

3.1.1 Akses Aman Penduduk Terhadap Air Minum

3.1.2 Pendanaan

3.1.3 Kelembagaan

3.1.4 Pengembangan dan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan

3.1.5 Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum

3.1.6 Peran dan Kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat

3.1.7 Inovasi Teknologi

3.2 Tantangan Pengembangan SPAM

3.2.1 Tantangan Internal

3.2.2 Tantangan Eksternal

SISTEMATIKA (OUTLINE) JAKSTRADA

BAB IV - KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

4.1 Skenario Pengembangan SPAM

4.2 Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM

BAB V - RENCANA AKSI PERCEPATAN INVESTASI PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

5.1 Umum

5.2 Alternatif Sumber Pendanaan

5.2.1 APBD

5.2.2 APBN

5.2.3 Anggaran BUMD dan/atau Masyarakat

5.2.4 Pinjaman

5.2.5 Kerjasama dengan Badan Usaha Swasta / Masyarakat

5.3 Kegiatan dan Prioritas

BAB V - PENUTUP

```
graph LR; A[Persiapan] --> B[Perumusan Visi dan Misi]; B --> C[Identifikasi dan Analisis Isu Strategis, Permasalahan dan Tantangan]; C --> D[Perumusan Tujuan dan Sasaran]; D --> E[Perumusan Kebijakan dan Strategi]; E --> F[Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Investasi];
```

Persiapan

Perumusan
Visi dan
Misi

Identifikasi
dan Analisis
Isu
Strategis,
Permasalah
an dan
Tantangan

Perumusan
Tujuan dan
Sasaran

Perumusan
Kebijakan
dan Strategi

Penyusunan
Rencana
Aksi
Percepatan
Investasi

LANGKAH KE 1 - PERSIAPAN

- Identifikasi dan analisis kondisi pelayanan penyediaan air minum pada saat itu.
- Identifikasi dan analisis produk kebijakan yang telah ada, termasuk produk perencanaan jangka menengah.
- Identifikasi target nasional dalam pengembangan SPAM.
- Identifikasi peraturan perundang-undangan (aspek legal) terkait.
- Identifikasi dan analisis struktur organisasi penyelenggara pengembangan SPAM, termasuk tugas dan fungsinya.
- Inventarisasi data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan analisis, penyusunan dan pengambilan keputusan selama proses penyusunan Jakstra Pengembangan SPAM.

LANGKAH KE 2 - PERUMUSAN VISI DAN MISI

- Visi dari Jakstra Pengembangan SPAM pada dasarnya merupakan suatu rumusan umum mengenai keadaan atau kondisi yang diinginkan pada akhir periode pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan SPAM di daerah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
- Visi harus dapat memberikan gambaran tentang kondisi pengembangan SPAM (penyediaan air minum) selama 5 tahun mendatang di daerah yang bersangkutan.
- Visi harus dapat memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja kebijakan dan strategi pengembangan SPAM.
- Visi harus bersifat rasional, realistis dan mudah dipahami;

PERUMUSAN VISI DAN MISI

- Visi harus bersifat fleksibel, sehingga bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan yang mungkin terjadi;
- Visi kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah harus mendukung pencapaian visi daerah.

Contoh rumusan Visi:

Misalnya Visi Pemerintah Daerah adalah:

“Terwujudnya masyarakat madani yang sehat dan sejahtera”

Sesuai dengan Visi Pemerintah Daerah tersebut, dan didasari oleh kondisi serta harapan ke depan, Visi dalam Jakstrada Pengembangan SPAM misalnya dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya penyediaan air minum yang berkualitas menuju masyarakat madani yang sehat dan sejahtera”

PERUMUSAN VISI DAN MISI

Kriteria yang dapat digunakan sebagai acuan dalam merumuskan misi Jakstra Pengembangan SPAM antara lain:

- dapat merupakan penjabaran secara umum dari kebijakan dan strategi nasional pengembangan SPAM;
- menggambarkan tindakan yang akan dilakukan agar visi yang diinginkan (jangka waktu 5 tahun) bisa tercapai; dan
- menjembatani penjabaran visi kepada tujuan.

Contoh rumusan Misi:

Dengan melihat contoh Visi yang telah dirumuskan di atas, maka Misi-nya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- *Mengembangkan cakupan pelayanan air minum untuk seluruh masyarakat sesuai dengan kaidah teknis yang berkelanjutan dan kearifan lokal.*
- *Meningkatkan kapasitas kelembagaan penyelenggara SPAM.*
- *Mengembangkan peran badan usaha swasta dan masyarakat dalam pengembangan SPAM yang berkualitas.*

LANGKAH KE 3 - IDENTIFIKASI DAN ANALISIS ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

- Langkah ke 3 ini merupakan langkah bagi Tim atau SKPD penyusun jakstra untuk mengidentifikasi dan menganalisis isu, permasalahan, potensi, kelemahan, peluang serta tantangan jangka menengah yang sekiranya akan dihadapi dalam rangka implementasi Jakstrada Pengembangan SPAM nantinya.
- Analisis dapat dilakukan dengan menganalisis perubahan-perubahan kebijakan yang akan terjadi, baik pada lingkungan internal organisasi, maupun eksternal organisasi.
- Inti dari langkah ini adalah untuk menemukan **isu strategis, akar permasalahan, dan tantangan** yang sekiranya dihadapi dalam melaksanakan pengembangan SPAM di daerah yang bersangkutan.

IDENTIFIKASI DAN ANALISIS ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

Dalam JakstraNas Pengembangan SPAM terdapat 7 (tujuh) arahan kebijakan atau 7 (tujuh) aspek utama yang perlu untuk diidentifikasi dan dianalisis permasalahannya, yaitu:

- Akses aman penduduk terhadap air minum.
- Pendanaan.
- Kelembagaan.
- Pengembangan dan penerapan peraturan perundang-undangan.
- Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum.
- Peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat.
- Inovasi teknologi.

1. AKSES AMAN PENDUDUK TERHADAP AIR MINUM

Akses aman penduduk terhadap air minum ini dianalisis dengan melihat:

- Seberapa besar (dalam prosentase) masyarakat yang mendapatkan pelayanan air minum perpipaan,
- Seberapa besar masyarakat yang memenuhi kebutuhan akan air minumnya melalui SPAM BJP dengan sumber air baku diambil dari sumur yang ada di tanah pekarangannya atau sumber air lain yang relatif jauh dari tempat tinggalnya.
- Apakah sumber air baku SPAM BJP yang digunakan oleh kebanyakan masyarakat tersebut **merupakan sumber air yang terlindungi (jauh dari pencemaran), atau diambil dari sumber air yang tidak terlindungi (dikuantifikasi dalam prosentase).**

1. AKSES AMAN PENDUDUK TERHADAP AIR MINUM

Akses aman penduduk terhadap air minum ini dianalisis dengan melihat:

- Pelayanan air minum perpipaan oleh PDAM, perlu juga dilakukan analisis terhadap kinerja pelayanan PDAM, khususnya yang terkait dengan kinerja teknis seperti kuantitas dan kualitas air minum yang dihasilkan dan didistribusikan kepada pelanggan, serta kontinuitas pelayanannya.
- **Apabila misalnya kontinuitas pelayanan air minum PDAM masih rata-rata 10 jam perhari, maka hal ini perlu dianalisis lebih dalam sehingga bisa diketahui akar permasalahannya, misalnya: apakah disebabkan oleh biaya operasi yang tinggi karena harus menggunakan pompa dengan suplai energi listrik dengan BBM, ataukah karena sistemnya yang sudah tua, ataukah karena air bakunya yang kurang, ataukah karena konsumsi air rata penduduk di tempat itu memang rendah, dan sebagainya.**

2. PENDANAAN

- Analisis terkait pendanaan dilakukan dengan melihat sejauh mana kemampuan pendanaan dari pemerintah daerah, PDAM, dan kemampuan masyarakat atau kelompok masyarakat untuk membiayai sendiri keperluan air minumnya.
- Sudahkah pemerintah daerah dan/atau PDAM memanfaatkan akses sumber pendanaan lain yang disediakan Pemerintah, lembaga keuangan/perbankan, atau badan usaha swasta (investor).
- Dalam hal terdapat keterbatasan anggaran dan belum diupayakan pemanfaatan sumber dana lainnya, maka perlu juga dilakukan analisis terhadap kemungkinannya untuk dapat mengakses sumber pendanaan lain yang disediakan oleh Pemerintah, lembaga keuangan/ perbankan, atau badan usaha swasta.
- Persyaratan untuk dapat mengakses pendanaan dari luar pemerintah perlu dianalisis dengan cermat agar kebijakan dan strategi yang akan diambil benar-benar dapat diimplementasikan dengan baik.

2. PENDANAAN

- Terkait dengan PDAM, perlu juga dilakukan analisis terhadap tarif yang diberlakukan saat ini, besaran tarifnya, mekanisme penyesuaiannya, dan kapan terakhir tarif tersebut disesuaikan, dan apakah tarif saat ini sudah menganut prinsip tarif *full cost recovery* (tarif rata-rata domestik sudah di atas harga pokok produksi) atau tarifnya masih belum bisa *FCR*.
- Dari hasil analisis aspek pendanaan tersebut selanjutnya disimpulkan, yang mungkin ada isu atau permasalahan seperti: masih terbatasnya anggaran dalam APBD yang dialokasikan untuk sektor/bidang air minum; terbatasnya anggaran PDAM untuk keperluan pengembangan; tarif air minum PDAM masih belum ditetapkan berdasarkan prinsip *full cost recovery*; badan usaha swasta masih belum mau berinvestasi di sektor/bidang air minum; dan/atau Pemerintah Daerah/PDAM belum mampu memenuhi persyaratan dalam mengakses sumber pembiayaan/dana lain yang disediakan oleh Pemerintah, lembaga keuangan/perbankan, atau badan usaha swasta.

3. KELEMBAGAAN

- Kelembagaan dimaksud adalah kelembagaan struktural di lingkungan organisasi pemerintah daerah setingkat dinas, sub dinas, atau seksi yang tugas dan fungsinya terkait dengan pengembangan SPAM, termasuk UPTD/BLUD; kelembagaan PDAM; dan kelembagaan penyelenggara pengembangan SPAM ada di masyarakat seperti koperasi, badan usaha milik desa, yayasan, atau badan usaha lainnya.
- Analisis terhadap kelembagaan tentunya tidak hanya menganalisis keberadaan struktur organisasinya saja, namun analisis terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia dan tata kerjanya, termasuk pemenuhan persyaratan atau kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagai suatu organisasi penyelenggara pengembangan SPAM yang berkualitas (misalnya untuk UPTD/BLUD, PDAM, BUMDES, atau Koperasi).

3. KELEMBAGAAN

Kesimpulan dari analisis aspek kelembagaan, antara lain dapat berupa:

- belum adanya lembaga struktural di pemerintah daerah yang uraian tugas dan fungsinya menyebut langsung pengembangan SPAM;
- masih belum kuatnya komitmen pemerintahan daerah dalam meningkatkan pengembangan SPAM bagi masyarakatnya;
- sumber daya manusia di bidang tehnik dan keuangan yang masih belum/kurang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan;
- belum adanya pembinaan dari Pemerintah/Pemerintah Daerah terhadap kelembagaan masyarakat penyelenggara pengembangan SPAM (seperti koperasi, BUMDES, yayasan, atau bentuk kelembagaan lainnya);
- belum dipenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen perencanaan pengembangan SPAM di tingkat daerah/PDAM; dan/atau
- belum adanya standar operasional dan prosedur yang mengarah kepada pemenuhan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

4. PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Analisis dilakukan terhadap semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sektor/bidang air minum yang telah ada di daerah, sudahkah peraturan perundang-undangan yang ada di daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat.
- Adakah peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang belum ditindak lanjuti pengaturannya di tingkat daerah dan/atau belum dipahami substansinya dengan benar. Perlu pula dikaji apabila ada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengembangan SPAM, baik yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, yang sekiranya menghambat atau sulit untuk diterapkan di daerah.
- Peraturan perundang-undang yang terkait dengan sektor/bidang air minum antara lain mencakup pula peraturan yang terkait dengan pengelolaan air tanah, pengelolaan aset, pendanaan, dan peraturan tentang kerjasama/ kemitraan dengan badan usaha dan masyarakat.

5. PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR BAKU UNTUK AIR MINUM

Analisis terhadap ketersediaan dan kebutuhan air baku dilakukan dengan:

- Mengidentifikasi sumber-sumber air baku yang ada di wilayah propinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan, termasuk berapa besar kapasitas andalan yang tersedia.
- Siapakah pengelola sumber air baku tersebut, dan siapa sajakah pemanfaat air pada saat ini dari sumber air baku tersebut.
- Apabila di wilayah administratif daerah yang bersangkutan tidak tersedia sumber air baku, adakah di daerah tetangga sumber air baku yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber air baku air minum.
- Di samping ketersediaan air baku, **perkiraan kebutuhan air baku untuk keperluan pengembangan atau peningkatan cakupan pelayanan air minum juga perlu untuk dianalisis dengan cermat**, sehingga kebijakan dan strategi pemenuhan air bakunya dapat dirumuskan dengan baik.

5. PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR BAKU UNTUK AIR MINUM

Hasil analisis atas air baku untuk air minum ini paling kurang akan menyajikan kesimpulan tentang:

- kondisi sumber air baku yang digunakan untuk pelayanan air minum pada saat ini (kualitas, kuantitas, dan kondisi daerah tangkapan airnya);
- akankah ketersediaan air baku yang ada sekarang mencukupi untuk rencana pengembangan SPAM ke depan;
- sudah adakah program dari penyelenggara pengembangan SPAM tentang rencana kebutuhan air baku untuk jangka waktu 5 tahun ke depan;
- sudahkah para penyelenggara pengembangan SPAM memiliki surat izin penggunaan air (SIPA); dan
- sudah adakah program/rencana dari pengelola sumber air baku (pengelola wilayah sungai atau pengelola cekungan air tanah) untuk mengalokasikan/menyediakan air baku bagi pengembangan SPAM daerah yang bersangkutan.

6. PERAN DAN KEMITRAAN BADAN USAHA DAN MASYARAKAT

- Analisis terhadap peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat dilakukan dengan melihat apakah pada saat sekarang di daerah yang bersangkutan sudah ada kerjasama dengan badan usaha atau masyarakat dalam pengembangan SPAM (termasuk SPAM untuk keperluan sendiri), dan seandainya telah ada, bagaimanakah kinerjanya saat ini.
- Apabila belum ada badan usaha yang tertarik untuk berinvestasi di bidang air minum di daerah yang bersangkutan, kendala dan permasalahan apa yang kira-kira pernah disampaikan oleh badan usaha yang bersangkutan (misalnya: masalah tarif awal dan penyesuaiannya, peraturan investasi di daerah yang tidak kondusif, khawatir adanya ketidakpastian hukum akibat adanya pergantian pimpinan di daerah, atau lingkup pengembangan SPAM yang akan dikerjasamakan kurang menarik).

6. PERAN DAN KEMITRAAN BADAN USAHA DAN MASYARAKAT

Hasil analisis atas peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat ini dapat menyajikan kesimpulan tentang:

- Ada atau tidak adanya peran dan kemitraan dari badan usaha dan masyarakat dengan alasan atau sebab-sebabnya, serta gambaran kinerjanya apabila memang ada peran atau kemitraan dari badan usaha dan masyarakat tersebut.
- Sebab-sebab belum adanya peran atau kemitraan dari badan usaha dalam pengembangan SPAM perlu dirinci, antara lain apakah terkait dengan perizinan, peraturan atau prosedur tentang kerjasama, masalah tarif, lingkup proyek kerjasama yang kurang menarik atau proyek tidak layak secara finansial, dan/atau karena kinerja PDAM yang belum sehat.

7. INOVASI TEKNOLOGI

- Teknologi yang dianalisis tidak hanya teknologi yang digunakan pada unit produksi, namun juga teknologi yang digunakan pada unit air baku dan unit distribusi termasuk untuk penanganan kebocoran/ kehilangan air pada jaringan distribusi.
- Teknologi yang berkembang di daerah yang didasarkan pada kearifan lokal (yang mungkin tersedia pada daerah tertentu), perlu juga untuk dianalisis sejauh mana penggunaannya saat ini dalam mendukung pengembangan SPAM di daerah yang bersangkutan.
- Hasil analisis aspek teknologi yang digunakan dan yang tersedia di daerah mungkin akan dapat disimpulkan sebagai berikut: teknologi yang ada belum didukung dengan kemampuan sumber daya manusia yang memadai, teknologi yang ada kurang bisa beradaptasi dengan kearifan lokal, atau belum ada teknologi yang bisa lebih efisien dalam penggunaan energi sehingga diperlukan adanya suatu inovasi teknologi tertentu.

TANTANGAN DAN ISU STRATEGIS

- Tantangan merupakan kendala yang akan dihadapi, yang merupakan benturan terhadap tujuan dan sasaran yang akan dicapai. **Ada yang bisa diperkirakan** (dapat ditepis dengan memaksimalkan peluang atau kesempatan yang diperoleh dari lingkungan eksternal), **dan ada yang tidak bisa diperkirakan** (ditepis dengan memaksimalkan daya atau kekuatan organisasi).
- Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan SPAM.
- Isu-isu strategis umumnya dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan, tantangan dan potensi pembangunan kedepan, yang dapat meliputi aspek fisik-lingkungan, sosial-budaya, ekonomi-keuangan dan legal-kelembagaan.

TANTANGAN DAN ISU STRATEGIS

100 – 0 – 100

2019

TANTANGAN DAN ISU STRATEGIS

Tantangan dapat dipisahkan ke dalam tantangan internal dan tantangan eksternal:

Tantangan internal misalnya:

- meningkatkan cakupan pelayanan air minum
- mengoptimalkan potensi dalam hal pendanaan
- adanya tuntutan untuk penyelenggaraan SPAM yang profesional
- memenuhi kebutuhan air baku untuk air minum

Tantangan eksternal misalnya:

- Memenuhi target nasional pengembangan SPAM
- memenuhi komitmen MDG
- meningkatkan tingkat derajat kesehatan masyarakat
- meningkatkan iklim investasi yang kompetitif

LANGKAH KE 4 – PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN

- Banyak arti atau pengertian dari tujuan dan sasaran, yang salah satu pengertian dari tujuan dan sasaran tersebut antara lain:
- Tujuan adalah suatu artikulasi dari nilai-nilai yang dirumuskan dalam kaitannya dengan isu dan persoalan (permasalahan) yang diidentifikasi terhadap pencapaian hasil kebijakan dan keputusan yang ditentukan (*Dickey*).
- Sasaran adalah suatu keinginan yang diharapkan untuk dicapai merupakan spesifikasi dari tujuan meskipun tidak selalu harus diungkapkan secara kuantitatif (*Dusseldorp*).
- Dari pengertian tersebut, perumusan sasaran diharapkan dapat menghasilkan suatu pernyataan spesifik yang menyangkut pencapaian tujuan yang bersifat terukur dan mempunyai kerangka waktu dalam pencapaiannya.

PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN

- Dalam penentuan Tujuan dapat digunakan kriteria sebagai berikut:
 - a. Tujuan harus sejalan dengan visi dan misi, serta berlaku pada periode Jasktra Pengembangan SPAM (periode 5 tahun/jangka menengah).
 - b. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai paling kurang pada periode Jasktra Pengembangan SPAM .
 - c. Tujuan harus dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki organisasi pelaksana Jakstra Pengembangan SPAM.
 - d. Tujuan harus dapat mengarahkan perumusan sasaran, strategi dan kebijakan dalam rangka merealisasikan misi.
- Pernyataan “Tujuan” pada umumnya relatif tidak dapat ditarik kejelasan dan keterincian, oleh karena itu “Sasaran” berfungsi untuk memperjelas maksud, rincian dan ukuran ketercapaian “Tujuan”.

PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN

Contoh rumusan Tujuan dan Sasaran.

Tujuan:

“Tercapainya peningkatan cakupan wilayah pelayanan air minum.”

Sasaran:

- Memperluas akses aman penduduk dalam pemenuhan kebutuhan air minum menjadi ..%. untuk wilayah perkotaan.*
- Meningkatkan peran masyarakat desa dalam pengembangan SPAM BJP dengan sumber air terlindungi sehingga mencapai ..% dari jumlah penduduk perdesaan, **atau***
- Mengurangi akses air minum penduduk dari SPAM BJP dengan sumber air tidak terlindungi sehingga mencapai ..% dari jumlah penduduk perdesaan.*
- Mengurangi tingkat kehilangan air PDAM sebesar ..% dari yang ada sekarang.*

Dalam satu tujuan bisa dirumuskan lebih dari satu sasaran.

LANGKAH KE 5 – PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Secara umum kebijakan dan strategi disusun **sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan** dalam kurun waktu jangka menengah serta mempunyai dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran.

Dengan demikian kebijakan dan strategi akan **memuat langkah-langkah berupa penetapan program-program indikatif** untuk memecahkan permasalahan penting dan mendesak tersebut, yang bisa mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran, sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi pengembangan SPAM daerah.

LANGKAH KE 5 – PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI

- Dalam JasktraNas Pengembangan SPAM dijelaskan bahwa kebijakan pengembangan SPAM dirumuskan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan dalam pengembangan SPAM.
- Berdasarkan kelompok kebijakan yang telah dirumuskan di atas, ditentukan arahan kebijakan sebagai dasar dalam mencapai sasaran pengembangan SPAM yang diarahkan untuk memenuhi sasaran RPJMN 2015-2019.
- Dalam JakstraNas rumusan substansinya “sama” dengan rumusan arahan kebijakan (yang terdiri dari 7 aspek) dan juga sama dengan substansi rumusan isu dan permasalahan yang dianalisis, yang cara-cara analisisnya **telah diuraikan dalam Langkah Ketiga** dari pedoman ini.

LANGKAH KE 5 – PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI

- ❑ Dalam satu kebijakan dapat dirumuskan lebih dari satu strategi, yang hal ini sangat berhubungan erat dan tergantung dari hasil analisis dari masing-masing isu strategis dan permasalahan yang telah dilakukan.
- ❑ Kebijakan Nasional Pengembangan SPAM yang dapat digunakan untuk perumusan Kebijakan Daerah Pengembangan SPAM tersebut (dengan sedikit penyesuaian untuk daerah) **misalnya** :
 - Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat di perkotaan dan perdesaan.
 - Pengembangan kemampuan pendanaan.
 - Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
 - Pengembangan dan penerapan peraturan perundang-undangan di daerah.
 - Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan.
 - Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat.
 - Pemanfaatan dan inovasi teknologi SPAM.

CONTOH PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI

LANGKAH KE 6 – PENYUSUNAN RENCANA AKSI

Langkah Keenam dilakukan dalam rangka menyusun rencana aksi percepatan pelaksanaan kebijakan, strategi dan program (rencana tindak) agar tujuan dan sasaran Jakstra Daerah Pengembangan SPAM dapat segera terwujud. Rencana aksi dari Jakstra Daerah Pengembangan SPAM menguraikan kegiatan-kegiatan strategis yang harus dilakukan untuk beberapa isu atau permasalahan penting agar percepatan investasi segera dapat diwujudkan dan cakupan pelayanan bisa segera ditingkatkan.

**HAL YANG SANGAT MENDASAR DAN PENTING,
“UMUMNYA” ADALAH MASALAH SUMBER PEMBIAYAAN**

**terima
kasih**

